

IMPLEMENTASI PENGASUHAN TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH YAYASAN PANTI ASUHAN KOTA MALANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASAL 37 AYAT 2 (Study Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Kota Malang)



Oleh: BUDIARSIH PURWANDARI (03400139)

Dept. of Law

Dibuat: 2008-04-07 , dengan 3 file(s).

Keywords: Pengasuhan, Anak Terlantar, dan Perlindungan Anak.

Fenomena yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah pentingnya menyikapi dan menanggulangi permasalahan anak terlantar yang kian bertambah jumlahnya dan memperhatikan kehidupannya. Karena anak adalah sebagai tunas dan penerus bangsa. Dalam menangani anak terlantar ini Pemerintah sangat berperan penting dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak-anak terlantar, khususnya anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua. Walaupun sudah terjadi penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Pemerintah tetapi jumlah anak terlantar, khususnya yang tidak mempunyai orang tua semakin lama semakin bertambah. Hal itulah yang menjadi alasan untuk melakukan analisis atas implementasi pengasuhan terhadap anak terlantar oleh Yayasan Panti Asuhan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 37 ayat 2 (study kasus di Yayasan Panti Asuhan Kota Malang).

Dari uraian diatas, dengan tujuan untuk memberikan batasan analisis dalam study tersebut, maka ditarik kesimpulan suatu pokok permasalahan yaitu, Bagaimana implementasi pengasuhan terhadap anak terlantar oleh Yayasan Panti Asuhan di Kota Malang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 37 ayat2 dan Apakah kendala Yayasan Panti Asuahn dalam mengasuh anak terlantar.

Dalam rangka melakukan analisis permasalahan diatas, penulis mengambil metode pendekatan yuridis sosiologis adalah memperhatikan penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di masyarakat. Pengambilan data berasal dari Yayasan Panti Asuhan Kota Malang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan metode Diskripsi Analisis yaitu menyoroti gejala hukum dalam prakteknya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada implementasi pengasuhan anak terlantar oleh pemerintah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 37 ayat 2, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, bahwa dalam pengasuhan anak terlantar yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah yaitu Kantor Bagian Sosial Keekretariat Kota Malang, tetapi faktanya Pemerintah mengalihkan tanggungjawabnya kepada Yayasan Panti Asuhan yang berada di bawah naungan Pemerintah. Disini Pemerinah dalam menangani anak terlantar hanya memberikan berupa bantuan dana pangan, dana usaha usaha ekonomis produktif dan dana kebutuhan anak terlantar, sedangkan dana untuk pendidikan Pemerintah tidak menyediakannya. Yayasan Panti Asuhan dalam pengasuhan anak terlantar khususnya yang tidak mempunyai orang tua memberikan berupa pendidikan, keagamaan, dan keterampilan.

Ada dua kendala yang dihadapi oleh Yayasan Panti Asuhan yang berada di bawah naungan Pemerintah dalam pengasuhan anak terlantar khususnya yang tidak mempunyai orang tua yaitu dari segi mental anak terlantar dan dari segi pendanaan untuk mengasuh anak terlantar

khususnya yang tidak mempunyai orang tua.

Nowadays phenomena existed in Indonesian Society is the importance of eradicating waif problems which has larger amount and concerned life. Since children are the next person who continues our country's destination. In handled this waif, the government has important role and responsible to the prosperity of waif, especially orphan waif. Though waif care has been done by the government, but the amount of waif, especially orphan, get larger. That's the major reason to do analysis in implementation of waif care by Orphan House in Rule No.23 / 2002 about Children Protection section 37 art (2) (Cases Study at Orphan House Institution Malang City) Above explanation showed the limit of analysis, there could be concluded the statement of problems : How the implementation of waif care by Orphan House at Malang City according Rule No.23 year 2002 about Children protection section 37 art (2) and what the problems of orphan house in taking care the waif.

In doing analysis, the writer took socio-juridical approach by paying attention to the law application. Data collection came from Orphan House Institution – Malang City. Data Collection technique was done by interview, documentation, and existing rule. Data collected was analyzed by analytical description method, which focused on law phenomena in its practice, related with the existing rule.

According to the research, at implementation of waif care by government in the rule No.23 / 2002 about Children Protection section 37 art (2), there could be concluded : waif care should be done by government, especially Social Institution – Orphan Department Malang City. But in fact, the government move their responsibility to the orphan house under the government. In taking care the waif, the government only giving fund about food budget, productive-economic budget, waif need, and for education, the government didn't have the fund. Orphan Institution in taking care the waif, especially orphan, giving education, religion, and skill.

There were two problems faced by Orphan House Institution under government responsibility in taking care the waif, especially orphan. From mental side and budget for taking care the waif, especially who has no parents.